

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latarbelakang Penelitian

Kesejahteraan merupakan hak seluruh warga negara. Tujuan suatu negara merdeka salah satunya untuk memperbaiki kesejahteraan, sesuai dalam Pembukaan UUD tahun 1945 alinea keempat dan dituangkan pula dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kewenangan negara untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk kemandirian dan mengurangi angka kemiskinan.

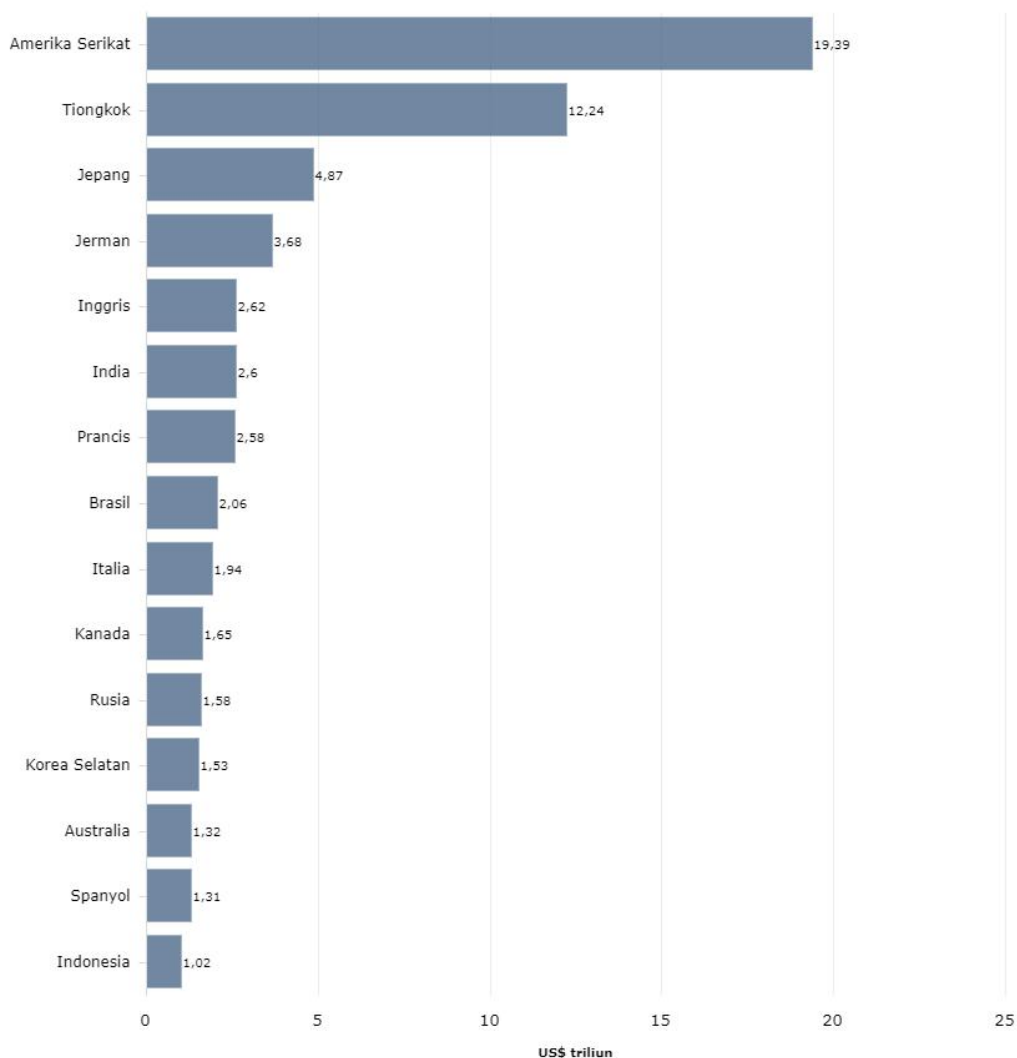
Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, terbebas dari belenggu kemiskinan. Amanat konstitusi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memurukkan Indonesia ke dalam kemiskinan yang lebih serius dan berakibat pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat seperti rendahnya tingkat kesehatan, penurunan gizi, dan keterbelakangan pendidikan.<sup>1</sup> Setelah berjalan lebih dari 20 tahun Indonesia berhasil menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar dunia. Berdasarkan data Tradingeconomics Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2017 sebesar US\$ 1,01 triliun atau setara

---

<sup>1</sup> Jurnal Dialog Kebijakan Publik, *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya*, (Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 8, Desember 2012), 11.

Rp 13.589 triliun. Ini merupakan pertama kalinya PDB Indonesia tembus di atas US\$ 1 triliun.



**Gambar 1.1 :**  
**15 Negara dengan PDB di Atas US\$ 1 Triliun (2017)<sup>2</sup>**

Namun, walaupun begitu masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/22/indonesia-masuk-dalam-daftar-negara-dengan-pdb-us-1-triliun#>. Diakses pada tanggal, 30 April 2020.

berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa Bangsa dan Negara kehilangan arah dan rakyatpun lama- kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.<sup>3</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 sebanyak 24,79 juta jiwa. Adapun tingkat kemiskinan sebesar 9,22%. Data dapat dilihat di bawah ini :



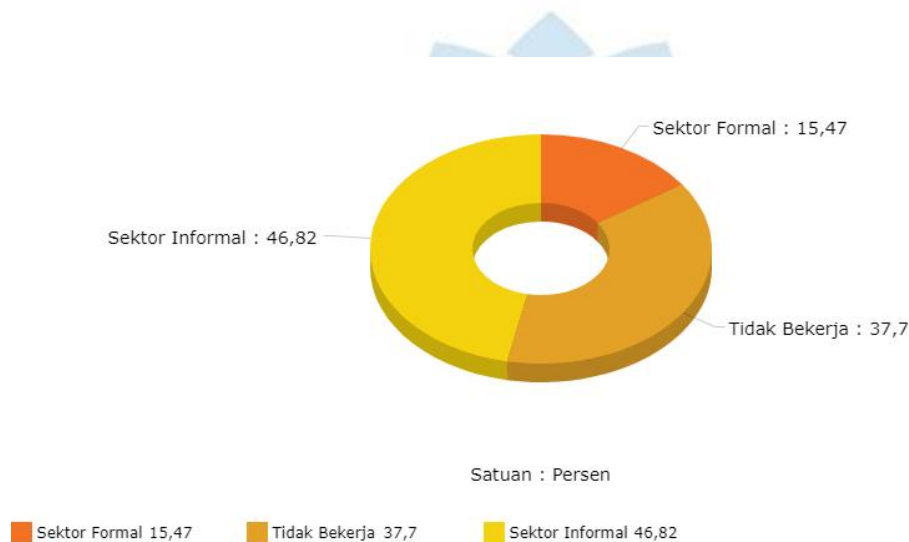
**Gambar 1.2. :**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (2012-2019)<sup>4</sup>**

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu

<sup>3</sup> Wisnu Indrajid VO Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. (Malang: Intrans Publishing, 2014), 25.

<sup>4</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/berapa-jumlah-penduduk-miskin-indonesia>. Diakses pada 30 April 2020.

bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya. Persoalan kemiskinan ini juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori pengangguran terselubung, dimana mereka tidak produktif pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.<sup>5</sup>



**Gambar 1.3 :**

### **Persentase Penduduk Miskin Menurut Sektor Pekerjaan<sup>6</sup>**

Pada 2015, sekitar 37 persen penduduk miskin di Indonesia tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, 47 persen hanya bekerja pada sektor informal seperti wiraswasata, buruh lepas, ataupun pekerja bebas. Artinya, sektor ini bekerja pada lingkungan kerja yang tidak resmi. Hanya sekitar 15 persen penduduk miskin

<sup>5</sup> Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 285.

<sup>6</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/08/37-persen-penduduk-miskin-tidak-memiliki-pekerjaan>. Diakses pada 30 April 2020.

yang dapat merasakan bekerja di sektor formal seperti karyawan atau pegawai resmi.

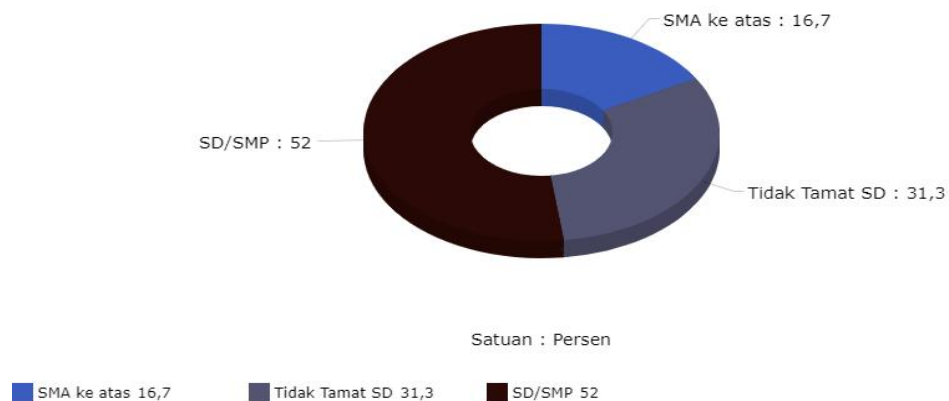
Lapangan pekerjaan yang semakin sulit dan juga rendahnya status pendidikan pada penduduk miskin menjadi penyebab tingginya persentase penduduk miskin yang tidak bekerja dan bekerja di sektor informal. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin kurang dapat bersaing dalam mencari pekerjaan di sektor formal.

Kesadaran akan kehidupan masyarakat Indonesia yang masih rendah kualitas hidupnya dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Untuk menjawab tantangan itu, maka diperlukan adanya kesatuan visi nasional, keterpaduan langkah dan tekad untuk mencapai cita-cita membangun sumber daya manusia yang merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, parlemen maupun masyarakat.<sup>7</sup>

Pada 2015, sekitar 52 persen penduduk miskin yang berusia di atas 15 tahun hanya dapat menamatkan pendidikan sampai jenjang SD/SMP. Bahkan, 31 persen lainnya tidak mampu menempuh jenjang Sekolah Dasar. Hanya 16,7 persen penduduk miskin yang dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA atau lebih tinggi. Rendahnya angka tingkat pendidikan ini berakibat pada kualitas manusia yang semakin menurun dan tidak mampu bersaing dalam dunia kerja.

---

<sup>7</sup> Ahmad Sukarno, *Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah: Penerapan dan Permasalahannya Terkait Kebijakan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan*, (Jurnal Administrasi Publik, Vol. V No. 2; Makassar: PKP2A II LAN, 2009), 14.



**Gambar 1.4. :**

Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan pada 2015<sup>8</sup>

Program wajib belajar 12 tahun menjadi suatu kebijakan yang ditawarkan pemerintah guna memperbaiki sektor pendidikan di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas sosial-ekonomi dan mengurangi kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, setiap anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah atas dan dapat bersaing di dunia kerja.

Dalam Islam juga diatur tentang bantuan yang diberikan pada orang yang membutuhkan seperti pemberian zakat, infaq dan sedekah. Namun diantara ketiganya yang paling terkait dengan pembahasan ini adalah infaq, dimana infaq merupakan suatu pemberian yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sebagaimana Program Keluarga Harapan diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia mereka sehingga dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Baqarah: 272-274:

<sup>8</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/08/52-penduduk-miskin-berpendidikan-sdsmp>. Diakses Tanggal 30 April 2020.

۞ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
 خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
 خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ ۞ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي  
 سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ  
 مِنَ التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا  
 مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ ۞ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
 يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ ۞

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allahlah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”<sup>9</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang menafkahkan hartanya di jalan Allah atau untuk suatu kebaikan maka, akan mendapat balasan/pahala dan tidak akan mendapat kerugian. Manusia dianjurkan untuk berinfaq kepada sesamanya khususnya kepada orang miskin yang mana mereka tidak dapat berusaha atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka tidak meminta-minta. Suatu Negara yang bertanggung jawab atas rakyatnya haruslah membantu rakyat miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan

<sup>9</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit Diponegoro, 1994), 46.

hidupnya. Seperti yang dilakukan di Indonesia dengan kebijakan Keluarga Harapan sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan jalan meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan.

Membahas tentang jaminan sosial Islam, artinya berbicara tentang jaminan negara dalam arti yang sesungguhnya, yakni bantuan dari negara yang merupakan kewajibannya. Jaminan di sini bukan *Compulsory Social Insurance* atau asuransi sosial sebagaimana paradigma jaminan dalam sistem kapitalis. Jaminan sosial dalam sistem Islam adalah kewajiban negara dan merupakan hak sosial rakyat.<sup>10</sup> Secara umum didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).<sup>11</sup>

Program Keluarga Harapan memiliki dua fungsi yaitu<sup>12</sup> untuk jangka pendek dengan membantu meringankan beban pengeluaran RTSM/KSM dan jangka panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan sehingga dapat berpengaruh terhadap usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia termasuk di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

Penduduk Kabupaten Majalengka semakin bertambah tiap tahunnya pada sekitar 0,49% untuk rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2013-2019. Angka ini tergolong rendah untuk pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat yang ada pada kisaran 1,52% dan Indonesia pada 1,28% pada rentang tahun yang sama. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif kecil ini memberikan jumlah penduduk bertambah 40.499 jiwa antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, atau dalam 7 tahun hanya meningkat 40.499 jiwa. Tabel berikut menunjukkan

<sup>10</sup> Siti Fadhilah Supari, *Opini-Asuransi Sosial Bertentangan dengan UUD*, 6 Mei 2011, pdf.jamsosindonesia.com, (diakses Maret 2020).

<sup>11</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 6.

<sup>12</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2017),



perkembangan penduduk di Kabupaten Majalengka pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1. 1.

Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya Kabupaten Majalengka

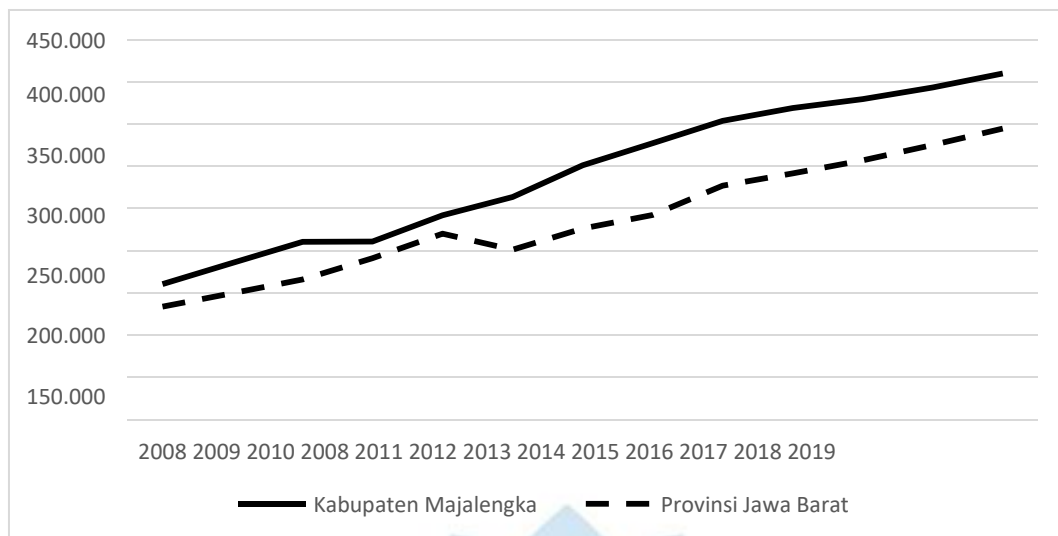
Tahun	Penduduk Kab. Majalengka (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)
2013	1,153,226	
2014	1,158,882	0.49
2015	1,164,724	0.50
2014	1,170,505	0.50
2015	1,176,313	0.50
2016	1,182,109	0.49
2018	1,188,004	0.50
2019	1,193,725	0.48

Sumber: BPS Majalengka 2019

Peningkatan jumlah penduduk yang relatif kecil ini berimplikasi pada dua hal yang saling bertolak belakang. Pertama penduduk yang relatif sedikit memungkinkan pengaturan atas berbagai program pemerintah yang lebih baik, dan memudahkan pendataan atas berbagai kepentingan yang berkaitan dengan program pemerintah. Hal ini karena jumlah penduduk yang sedikit memberikan effort atau pengerahan sumber daya yang tidak terlalu besar. Dampak yang kedua, adalah potensi pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk di Kabupaten Majalengka yang kecil. Hal ini memberikan arahan pada orientasi ekspor ke luar Kabupaten Majalengka untuk pemasaran atas barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Majalengka. Peningkatan produksi barang dan jasa di Kabupaten Majalengka harus diarahkan untuk pemasaran ke luar Kabupaten Majalengka, selain telah mencukupi untuk memenuhi permintaan dari warga kabupaten Majalengka.<sup>13</sup>

Begitu juga dengan angka tingkat kemiskinan yang ada di daerah Majalengka dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dilihat dari garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kabupaten Majalengka yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kasie kesejahteraan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 11.00

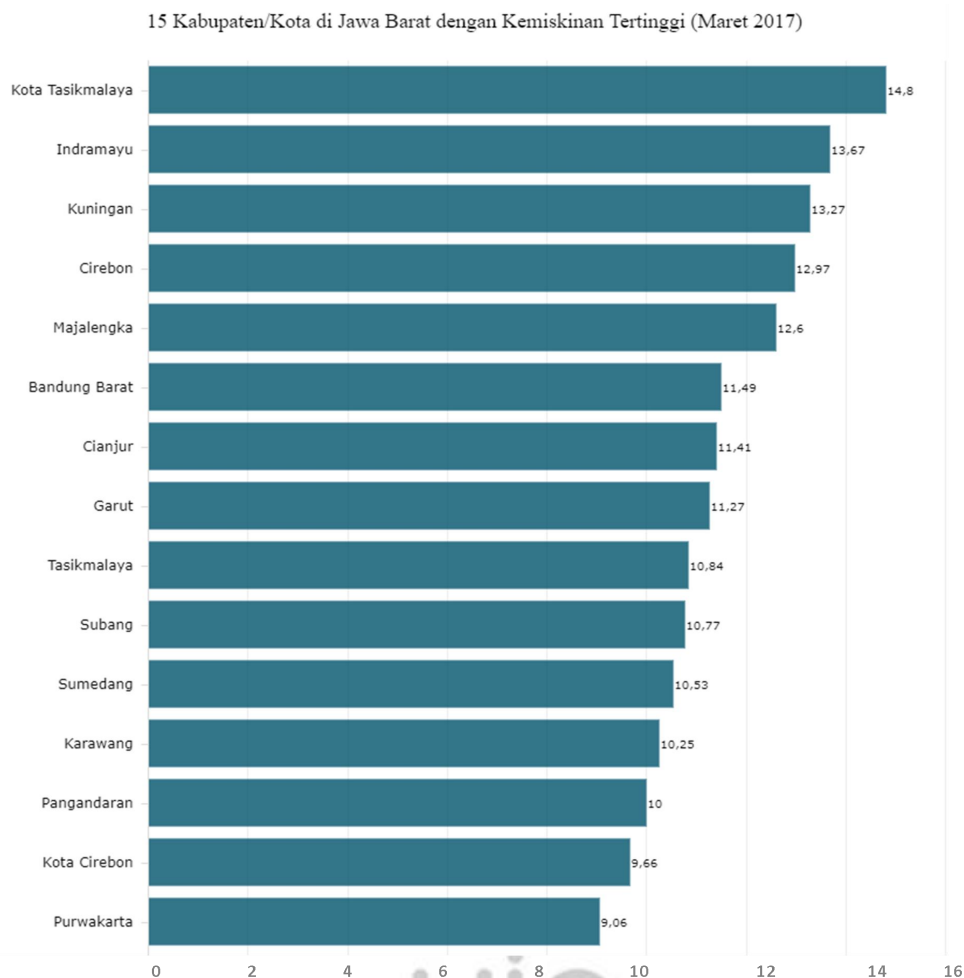


Sumber : BPS (diolah) 2019

**Gambar 1.5**  
**Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jawa Barat**

Jumlah penduduk yang relatif sedikit di Kabupaten Majalengka harus dilihat pula dari sisi kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan ini memberikan gambaran atas bagaimana keberhasilan dari perekonomian dan program pemerintah dalam mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu tingkat keberhasilan dalam mendongkrak kesejahteraan adalah angka kemiskinan. Dimana jika terjadi penurunan angka kemiskinan, terutama secara absolut menunjukkan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Penduduk di Kabupaten Majalengka dapat menikmati peningkatan kesejahteraan bagi penduduk yang masuk kategori miskin. Hal ini terlihat pada peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Majalengka yang terus meningkat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017.



**Gambar 1.6.**  
**Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Kemiskinan Tertinggi**  
**(Maret 2017)**

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa terjadi pergeseran standar miskin di Kabupaten Majalengka, tentunya data ini bersifat nominal tanpa memperhitungkan inflasi. Garis kemiskinan yang meningkat menunjukkan tingkat daya beli yang naik secara nominal bagi kalangan miskin di Kabupaten Majalengka. Walau bagaimanapun, bila kita bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, garis kemiskinan di Kabupaten Majalengka ada di atas garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Gambaran ini menunjukkan dasar kemiskinan dari garis

kemiskinan di Kabupaten Majalengka lebih baik (lebih tinggi) dibandingkan dengan rata-rata di Provinsi Jawa Barat.<sup>14</sup>

Adapun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilaksanakan di desa-desa yang berada di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 antara lain :

No.	Nama Desa	Jumlah KK	Besaran Bantuan
1.	Desa Buniwangi	241	Rp. 9.387.497,-
2.	Desa Cisambeng	361	Rp. 10.633.497,-
3.	Desa Enggalwangi	251	Rp. 6.904.163,-
4.	Desa Karamat	371	Rp. 9.883.328,-
5.	Desa Palasah	221	Rp. 6.691.662,-
6.	Desa Majasuka	211	Rp. 6.204.164,-
7.	Desa Pasir	281	Rp. 8.074.995,-
8.	Desa sindang haji	231	Rp. 5.604.164,-
9.	Desa Sindangwasa	221	Rp. 5.758.331,-
10.	Desa Tarikolot	471	Rp. 13.513.581,-
11.	Desa Trajaya	281	Rp. 8.051.694,-
12.	Desa Waringin	911	Rp. 26.173.420,-
13.	Desa Weragati	191	Rp. 4.783.331,-

Tabel 1.2. :

### Sebaran Penerima PKH di Kec. Palasah Kab. Majalengka

Jumlah penerima PKH di wilayah Kec. Palasah sebanyak 423 kk dengan nilai uang sebesar Rp. 114.491.607.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan Program keluarga Harapan tersebut yang memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, ataupun keluarga sangat miskin untuk meningkatkan sumber daya manusia, melalui pendidikan dan kesehatan, dan untuk memperbaiki sistem ekonomi dalam

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kasie kesejahteraan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 11.00

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Dodi Jaya, S. Pd sebagai Pendamping PKH Kec. Palasah Kabupaten Majalengka. Kegiatan Pencairan Dana PKH (Program Keluarga Harapan) Tahap 4 Tahun 2019 selesai jam 09.45 Wib.

keluarga yang dikategorikan keluarga sangat miskin. Hal tersebut dalam Islam merujuk kepada hukum yang bersifat universal, yakni hukum agama Islam yang disebut Maqashid Syariah. Tujuan syariat Allah SWT bagi makhluknya adalah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan atau generasi, dan menjaga harta demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.

Akan tetapi dalam praktiknya, Program Keluarga Harapan (PKH) tidak luput dari berbagai permasalahan. Dari sisi input, berdasarkan observasi lapangan dari pendamping PKH, ada beberapa permasalahan yang ditemui, antara lain ketidaktepatan sasaran program, artinya yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah warga yang sudah mampu. Dari sisi implementasi, dalam pemeriksaannya, BPK RI masih menemukan permasalahan dalam pelaksanaan PKH secara nasional, antara lain komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung PKH masih kurang, proses validasi tidak sesuai ketentuan sehingga hasil validasi tidak akurat, proses verifikasi atas komitmen peserta PKH terhadap kesehatan dan pendidikan belum optimal, tidak ada keseragaman kebijakan yang ditetapkan oleh Kemensos sehingga pembayaran bantuan menjadi kurang efektif dan monitoring rutin/berkala dan evaluasi belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum.<sup>16</sup>

Temuan BPK RI sejalan dengan temuan Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Majalengka dalam monitoring dan evaluasi (monev) di seluruh kabupaten/kota sebagai agenda rutin dalam memantau pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal tersebut merupakan salah satu alasan peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Majalengka. Dari aspek output bidang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Majalengka untuk tingkat SMA/ sederajat tergolong masih rendah karena masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah, seperti terlihat pada grafik berikut :

---

<sup>16</sup> Temuasn BPK RI, 2018.

APK (Angka Partisipasi Kasar ) dan APM ( Angka Partisipasi Murni) SD,SMP, dan SMA sederajat Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Tahun 2015/2016

SD/ MI		SLTP/ MTS		SMA/ MA	
APK	APM	APK	APM	APK	APM
109,01	96,35	100,36	82,54	63,44	43,2

Gambar 1.7

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD, SMP, SMA/Sederajat Kabupaten Majalengka Tahun Ajaran 2015/2016

APK (Angka Partisipasi Kasar ) SD,SMP, dan SMA Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Tahun 2016/2017

SD/ MI		SLTP/ MTS		SMA/ MA	
APK	APM	APK	APM	APK	APM
105,37	97,18	100,4	79,58	74,24	56,6

Gambar 1.8

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD, SMP, SMA/Sederajat Kabupaten Majalengka Tahun Ajaran 2016/2017

Tabel di atas terdapat data yang berisi APK dan APM dari SD sampai SMA dari tahun 2015/ 2016 hingga 2016/ 2017 di Kabupaten Majalengka. Isi dari tabel tersebut kita dapat melihat APK SD di tahun 2015/ 2016 mengalami penurunan dari 109,01 menjadi 105,37 di tahun 2016/ 2017, lalu pada jenjang SMP mengalami peningkatan dari 100,36 pada tahun 2015/ 2016 menjadi 100,40 di tahun 2016/ 2017 berbeda dengan jenjang sebelumnya, dan yang terakhir pada

tingkat SMA Angka Partisipasi Kasar mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 63,44 di tahun 2015/ 2016 menjadi 74,24 di tahun 2016/ 2017. Selain APK, tabel diatas juga menunjukkan APM Sekolah di Kabupaten Majalengka, dimana APM SD di Kabupaten Majalengka pada tahun 2015/ 2016 sekitar 96,35 meningkat menjadi 97,18 di tahun 2016/ 2017, sedangkan APM SMP mengalami penurunan dari 82,54 di tahun 2015/ 2016 menjadi 79,58 pada tahun 2016/ 2017, dan yang terakhir APM SMA di Kabupaten Majalengka juga mengalami peningkatan dari 43,20 di tahun 2015/ 2016 menjadi 56,60 di tahun 2016/ 2017<sup>17</sup>.

Program Keluarga Harapan (PKH) menghendaki setidaknya 80% anak-anak penerima manfaat terdaftar di satuan pendidikan SD sampai SMA. Peneliti menduga Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari penduduk di Kabupaten Majalengka menyumbang pada rendahnya persentase Angka Partisipasi Murni (APM) tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial, dari mulai tahapan input, proses sampai pada output karena Angka Partisipasi Murni (APM) dan SMA/ sederajat di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka masih di bawah angka 80%. Serta ditinjau dari sisi ekonomi syari'ahnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Oleh karena itu masalah ini diangkat dalam sebuah penelitian tesis dengan judul ***“IMPLEMENTASI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI TINGKAT PUTUS SEKOLAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH*** (Penelitian di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang penelitian di atas, maka masalah ini dapat dirumuskan dalam permasalahan berikut ini :

---

<sup>17</sup> Irza Adya Sugardha. *Upaya Ke Arah Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Majalengka; Pendekatan Kebijakan*. [http : ejournal.upi.edu > JAPSPs > article > download](http://ejournal.upi.edu/JAPSPs/article/download). Diakses Tanggal 30 April 2020.

1. Bagaimana kontribusi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan tingkat putus sekolah di kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka perspektif Ekonomi Syari'ah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan tingkat putus sekolah di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka perspektif ekonomi syari'ah?
3. Bagaimana solusi dari implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan tingkat putus sekolah di kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka perspektif ekonomi syari'ah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan tingkat putus sekolah di kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka perspektif ekonomi syari'ah.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan tingkat putus sekolah di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka perspektif ekonomi syari'ah.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan tingkat putus sekolah di kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka perspektif ekonomi syari'ah.

#### **2. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian diharapkan berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

##### **a. Secara Toritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan mendapatkan temuan-temuan terbaru sebagai pengembangan ilmu



pengetahuan khususnya dibidang ekonomi syari'ah dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Secara Praktis

a) Manfaat bagi penulis

Dapat menambah wawasan bagi peneliti dan peneliti selanjutnya dalam menganalisa sejauhmana progam pemerintah, sudah evektif diberikan pada masyarakat atau tidak. dan sejauh mana capaian dari Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu penanggulangan tingkat putus sekolang ditinjau dari ekonomi syari'ah.

b) Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan bisa memberikan masukan bagi keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan pentingnya pendidikan anak dan memanfaatkan bantuan untuk meringngankan beban biaya sekolah.

c) Manfaat bagi instansi

Dapat dijadikan sebagai informasi dan evaluasi factor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pendistribusian bantuan dibidang pendidikan dalam penanggulangan tingkat putus sekolah yang telah diberikan kementerian sosial melalui program keluarga harapan (PKH).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH) tentu sudah banyak yang meneliti. Untuk menghindari plagiasi dan kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka peneliti akan mencamtumkan beberapa penelitian terkait.

1. Lidya Nafatilona, "*Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Kota Administrasi Jakarta Utara (Studi Kasus Di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok)*". Tesis mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2011.

Hasil penelitiannya adalah untuk menganalisis pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam kepada guru, bidan, pendamping dan salah satu peserta PKH serta adanya kelompok fokus diskusi yang dilakukan dengan peserta PKH di Kelurahan Warakas dan didampingi oleh pendamping PKH. Hasil analisis yang didapat adalah bahwa dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti dalam sosialisasi, pencairan dana, dan budaya masyarakat Kelurahan Warakas yang membuat beberapa RTSM tidak lagi menjadi peserta PKH.

2. Depri Putri, *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesehatan Dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Di Umbulharjo Kota Yogyakarta*. Tesis mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) karakteristik peserta PKH berusia produktif, kualitas pendidikan formal rendah, menganut sistem keluarga besar, dengan kondisi hunian rumah kurang layak, kondisi ekonomi kurang yang ditandai penghasilan rendah; (2) 100% peserta PKH di Kecamatan Umbulharjo adalah RTSM/KSM. (3) 42,86% kondisi keluarga peserta PKH di Kecamatan Umbulharjo berada di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY tahun 2014 sebab dalam keluarga RTSM/KSM yang menjadi tulang punggung keluarga adalah perempuan (57.14%); (4) pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Umbulharjo merupakan salah satu program yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan keluarga RTSM/KSM, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan pendidikan.

3. Santoso Wobowo, *“Kajian Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Salah Satu Program Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Ngawi”*. Tesis mahasiswa pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2011.

Hasil penelitian pada kajian implementasi program menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan mampu memberi kontribusi yang serius

dan signifikan dalam upaya membantu penduduk sangat miskin, dengan adanya Program Keluarga Harapan masalah pendidikan dasar, kesehatan dasar, bahkan tingkat penghasilan keluarga dapat diperhatikan. Apresiasi yang tinggi layak diberikan kepada pemerintah karena begitu besar kepeduliannya dalam memprioritaskan arah dan sasaran pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan, untuk itu Program Keluarga Harapan (PKH) layak untuk berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai target yang telah ditentukan, dengan harapan bahwa cita-cita luhur bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dapat terwujud.

4. Misfi Laili Rohmi “*Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan Dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)*”. Mahasiswa pascasarjana Universitas Lampung Bandar Lampung. 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH sudah efektif dari aspek input (sudah tepat sasaran), aspek proses (sudah berjalan sesuai pedoman umum PKH) dan aspek output bidang pendidikan (anak didaftarkan di satuan pendidikan SD-SMA). Akan tetapi, PKH belum efektif dari aspek kesehatan pada beberapa indikator yaitu, perolehan suplemen fe, pemeriksaan posnatal care sebanyak 3 kali, pemeriksaan bayi 0-1 bulan sebanyak 3 kali, cakupan imunisasi lengkap balita 0-11 bulan, dan cakupan balita 0-11 bulan mendapat Vitamin A sesuai jadwal.

5. Istiqomah “*Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah*”. Tesis mahasiswa Program Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara konsep, program keluarga harapan di Kecamatan Tirtoyudo dalam perspekti Maqashid syariah yaitu : dalam menjaga agama (*Hifdzu din*) melalui silaturahmi yaitu dengan pertemuan kelompok, dalam menjaga akal (*Hifzu al-aql*) melalui akses pendidikan dan perubahan pola; dalam menjaga jiwa (*Hifdzu al- Nas*) melalui akses kesehatan;

dalam menjaga keturunan (*Hifdzu al-Nasl*) penjagaan atas kesehatan dan keselamatan ibu dan anak; dalam menjaga harta (*hifdzu al-mal*) melalui peningkatan sektor ekonomi para penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Sedangkan secara implementasi, program keluarga harapan di Kecamatan Tirtoyudo perspektif Maqashid syariah yaitu dalam implementasi pertama, penetapan sasaran penerima bantuan program keluarga harapan yaitu perempuan dalam hal ini ibu hamil dan menyusui dalam hal ini termasuk menjaga keturunan, sedangkan sasaran balita dalam bidang kesehatan termasuk kedalam menjaga jiwa dan sasaran bagi anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya hal ini termasuk menjaga akal. implementasi kedua, pertemuan dan sosialisasi yaitu terjadinya silaturahmi antar pemeluk agama, hal ini termasuk kedalam menjaga agama, Selain itu dalam proses sosialisasi dan pertemuan kelompok diadakan sharing dan diskusi seputar pendidikan, kesehatan dan ekonomi hal ini termasuk kedalam menjaga akal. Implementasi ketiga, penyaluran bantuan dan evaluasi program yaitu dengan memberikan tambahan penghasilan bagi penerima program keluarga harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk bidang pendidikan melalui bantuan tunai berupa uang.

Maqashid syariah dinyatakan secara langsung dalam Al-Quran oleh sejumlah ulama<sup>18</sup>. Imam Abu Hamid Al-Ghazali (w.5505H/1111M)<sup>19</sup>, pada abad ke lima hijriah menggolongkan maqashid kedalam lima kategori yaitu tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada keimanan (*din*), nyawa (*nafs*), Intelek (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta benda (*mal*) yang memenuhi kepentingan publik.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Dr. Umer Chapra / Penerjemah Ikhwa Abidin Basyri “*Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqasid Asy-Syariah*” Diantara ulama pendukung maqashidus syariah : Al Maturidin (w.333/945) Al-shashi (w.365/975), Al-Baqillani w.403/1012, AL-Ghazali-w.505/111, Fakhar Al-Din Al-Razi w.606/1252, Ibn Taiymiyah-w728/1327. (Solo-Aqwam 2017) Hal- 23

<sup>19</sup> Semua tanggal kematian menggunakan tahun hijriyah kemudian disamakan dengan kalender Gregorian.

<sup>20</sup> Dr. Umer Chapra / Penerjemah Ikhwa Abidin Basyri “*Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqasid Asy-Syariah*” pemikiran al-Ghazali, al-Mustasfa, 1937. (Solo-Aqwam 2017) Hal- 24

Imam Abu Ishaq As-Syatibi (w.790/1388) menlis tiga abad setelah Al-Ghazali namun daftar tersebut bukan *maqasid* ditujukan untuk memastikan kebahagiaan manusia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia memenuhi semua kebutuhannya. Ada banyak *maqasid* yang lain yang diindikasikan oleh al-Quran dan As-sunnah atau yang diistimbath oleh para ulama dari berbagai madzhab, maka dari itu lima maqosid ini disebut tujuan pokok (al-Asliyyah), sementara yang lainnya dipandang hanya mengikuti (tab'iyah).

Menurut Imam Fakhrudin Al-Razi ahli Fikih meletakkan jiwa manusia (annafs) pada urutan pertama<sup>21</sup>, dalam pembahasan pembangunan manusia dengan pemikiran ahli fikih Imam Fakhrudin Al-Razi sangat masuk akal, sumber daya manusia yang baik, memiliki keimanan dan kecerdasan akan mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, dengan alasan sederhananya karena manusia itu sendiri sebagai Khalifah Tuhan. Ditekankan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 : sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah suatu kaum, sehingga mereka merubah apa yang ada dalam dirinya sendiri. Kualitas manusia itu sendiri didukung oleh pendidikan, kesehatan baik jasmani maupun rohani harus lebih diutamakan sebagai wujud kesejahteraan.

Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu salahsatu solusi untuk memutus tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah tiap tahunnya di beberapa wilayah yang masih memerlukan bantuan untuk kesejahteraan dalam pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi hal tersebut tidak luput dari pengawasan dan evaluasi bagi penerima manfaat, yaitu dengan adanya sosialisasi dan pembinaan baik dari petugas PKH maupun tenaga pengajar (guru) sehingga anak penerima bantuan PKH untuk pendidikan ada peningkatan dalam belajar dan berprestasi. Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat agar hasilnya dapat menciptakan sumberdaya yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan.

---

<sup>21</sup> Dr. Umer Chapra / Penerjemah Ikhwa Abidin Basyri "Visi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqasid Asy-Syariah"urutan Maqosid Menurut Imam Fakhrudin Al-Razi ahli Fikih . (Solo-Aqwam 2017) Hal- 27